



Keterlibatan Politik ‘Aisyiyah dalam Advokasi Sosial

Alya Khoirun Nisa ^{1*}, Sulton Sulton ², Sunarto Sunarto ³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Alamat : JL Budi Utomo No. 10, Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63471.

Korespondensi penulis: alyanisya436@gmail.com *

Abstract. *Women's political involvement is an important aspect in promoting equitable social change, but unfortunately, political involvement in Indonesia is still relatively low due to a patriarchal culture and a lack of political party support. This study aims to analyze the forms of political involvement carried out by 'Aisyiyah in promoting social advocacy. The main focus of this study includes strategies, actors, and political participation spaces used by 'Aisyiyah in fighting for the interests of society, especially vulnerable groups. This research method uses a qualitative approach through a literature review of various relevant journals, reports, and articles. The data analysis technique in this study uses coding the results of the article review analysis, then grouped based on research variables and continued with drawing conclusions based on the data analysis variables used. The research findings show that 'Aisyiyah is actively involved in social advocacy through formal and informal political channels, and utilizes the power of organizational networks and religious values to strengthen its influence. 'Aisyiyah's political participation not only reflects women's collective awareness but also serves as an instrument in shaping social policies that are responsive to community needs. This study is expected to contribute to broadening understanding of the strategic role of women's organizations in the political and social arena.*

Keywords: *'Aisyiyah, Political Involvement, Religious Organizations, Social Advocacy, Women's Participation*

Abstrak. Keterlibatan politik perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong perubahan sosial yang berkeadilan namun sayangnya keterlibatan politik di Indonesia masing relatif rendah disebabkan adanya budaya patriarki, dan kurangnya dukungan partai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan politik yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah dalam mendorong advokasi sosial. Fokus utama penelitian ini meliputi strategi, aktor, serta ruang partisipasi politik yang digunakan oleh ‘Aisyiyah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dari berbagai jurnal, laporan, dan artikel yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan pekodean hasil analisis review artikel kemudian di kelompokkan berdasarkan variabel penelitian dan di lanjutkan dengan penarikan Kesimpulan berdasarkan variabel analisis data yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ‘Aisyiyah terlibat aktif dalam advokasi sosial melalui saluran politik formal dan nonformal, serta memanfaatkan kekuatan jaringan organisasi dan nilai keagamaan untuk memperkuat pengaruhnya. Partisipasi politik ‘Aisyiyah tidak hanya mencerminkan kesadaran kolektif perempuan, tetapi juga menjadi instrumen dalam membentuk kebijakan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai peran strategis organisasi perempuan dalam arena politik dan sosial.

Kata kunci: Advokasi Sosial, ‘Aisyiyah, Keterlibatan Politik, Organisasi Keagamaan, Partisipasi Perempuan

1. LATAR BELAKANG

Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem demokrasi yang partisipatif, adil, dan inklusif. Partisipasi perempuan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil dan politik, tetapi juga berkaitan langsung dengan keadilan sosial dan keberagaman perspektif dalam proses pengambilan kebijakan (Umagapi, 2020). Namun, dalam konteks Indonesia, Keterlibatan politik perempuan masih

menghadapi berbagai tantangan. Hambatan struktural, kultural, hingga diskriminasi berbasis gender menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik, baik dalam pencalonan maupun dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan data DPR RI periode 2019–2024, keterwakilan perempuan baru mencapai 20,5%, masih jauh dari target kuota 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketimpangan ini menunjukkan belum terwujudnya kesetaraan gender dalam politik secara substantif. Minimnya representasi perempuan tidak hanya berdampak pada kurangnya suara perempuan dalam proses legislasi dan kebijakan publik, tetapi juga membuat banyak isu-isu yang menyangkut kepentingan perempuan dan kelompok rentan kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan kebijakan yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (Dony Irawan, 2024).

Dalam konteks tersebut, organisasi perempuan berbasis agama seperti 'Aisyiyah memainkan peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat secara umum. Melalui berbagai aktivitas sosial, keagamaan, dan advokasi kebijakan, 'Aisyiyah menjadi aktor penting dalam memperkuat representasi politik perempuan. Isu-isu sosial seperti perlindungan anak dan perempuan, hak-hak penyandang disabilitas, pendidikan, hingga kesejahteraan keluarga menjadi fokus utama gerakan mereka. Peran aktif ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik perempuan tidak hanya terjadi di ruang formal seperti parlemen, tetapi juga melalui jalur non-formal seperti advokasi kebijakan yang berbasis masyarakat.

Sejumlah studi telah menyoroti keterlibatan 'Aisyiyah dalam ranah politik dan sosial. Penelitian Prihatin, (2021), dalam *Jurnal Civic Education* menyatakan bahwa 'Aisyiyah berperan sebagai agen kontrol politik dalam Pilkada 2020 di Ponorogo, sedangkan Nadliroh (2024), dalam *Jurnal Pemikiran Politik Islam* lebih menekankan pada peran pemberdayaan dan advokasi yang dilakukan organisasi ini menjelang Pemilu 2024. Kendati demikian, kajian yang secara spesifik mengupas keterlibatan 'Aisyiyah dalam advokasi kebijakan sosial, khususnya di tingkat lokal, masih sangat terbatas. Padahal, pada konteks lokal inilah perjuangan politik perempuan melalui organisasi keagamaan menjadi lebih konkret dan dekat dengan realitas masyarakat.

Perjuangan 'Aisyiyah dalam mempengaruhi kebijakan publik tentu tidak terlepas dari tantangan besar, terutama dominasi budaya patriarki yang masih kuat dan terbatasnya akses perempuan ke ruang-ruang pengambilan keputusan. Selain itu, dalam dinamika politik lokal yang kompleks, pengaruh organisasi perempuan dalam proses kebijakan sering kali dibatasi

oleh struktur kekuasaan yang maskulin. Meski begitu, ‘Aisyiyah tetap menunjukkan kapasitasnya sebagai kekuatan sosial-politik yang mampu mengadvokasi isu-isu publik secara konsisten dan terorganisir, menjadikan mereka sebagai salah satu contoh penting dalam studi representasi politik perempuan berbasis komunitas keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk representasi politik diwujudkan oleh ‘Aisyiyah melalui advokasi kebijakan sosial di tingkat lokal. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi strategi-strategi yang digunakan oleh organisasi tersebut dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang representasi politik perempuan, sekaligus memperkaya literatur mengenai peran organisasi perempuan berbasis agama dalam memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di tingkat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial-politik secara mendalam melalui penelaahan terhadap data teks dan dokumen. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik keterlibatan politik perempuan dalam konteks advokasi kebijakan sosial, khususnya melalui organisasi keagamaan seperti ‘Aisyiyah. Metode studi literatur digunakan untuk menghimpun, mengevaluasi, dan menafsirkan berbagai informasi yang berasal dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen organisasi, peraturan perundang-undangan, laporan riset, serta artikel media yang kredibel. Data dikumpulkan dengan menelusuri literatur yang membahas tentang representasi politik perempuan, advokasi kebijakan publik, gerakan sosial berbasis keagamaan, serta dinamika partisipasi perempuan dalam organisasi ‘Aisyiyah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni penelusuran sumber informasi dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti “representasi politik perempuan”, “advokasi kebijakan sosial”, “organisasi perempuan Islam”, dan “Aisyiyah dalam politik lokal”. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari berbagai database seperti Google Scholar, DOAJ, Sinta, dan perpustakaan digital. Setelah itu, dilakukan proses seleksi untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, memiliki kredibilitas akademik, dan berasal dari lima tahun terakhir, kecuali untuk sumber dasar. Data yang terkumpul kemudian dikategorisasi berdasarkan tema-tema utama

seperti bentuk advokasi, strategi representasi, pengaruh organisasi terhadap kebijakan, serta hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam dunia politik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Politik Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, implementasinya belum optimal. Persentase keterwakilan perempuan di parlemen dan lembaga pengambil keputusan lainnya belum mencapai target yang diharapkan. Salah satu penyebab utama adalah masih kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi persepsi masyarakat bahwa ranah politik bukanlah ruang yang “wajar” bagi perempuan. Perempuan dianggap lebih cocok berperan dalam urusan domestik, sementara urusan publik dan pengambilan keputusan cenderung didominasi laki-laki (Fauziah, 2023).

Selain hambatan budaya, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya dukungan dari partai politik terhadap kader perempuan. Banyak partai hanya menempatkan perempuan dalam daftar pencalonan untuk memenuhi kuota, tanpa memberikan pelatihan, dana kampanye, atau dukungan struktural yang cukup. Akibatnya, perempuan sering kali hanya menjadi simbol keterwakilan semu tanpa kekuatan politik nyata. Di sisi lain, masih banyak perempuan yang belum memiliki akses terhadap pendidikan politik dan informasi yang memadai untuk memahami sistem politik secara menyeluruh. Ketimpangan ini semakin memperlemah posisi perempuan dalam kontestasi politik yang kompetitif (Ningsih, 2025)

Namun, di tengah kondisi tersebut, muncul inisiatif dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang berupaya membuka ruang alternatif bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan kebijakan publik. Salah satu contoh paling menonjol adalah ‘Aisyiyah, organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. ‘Aisyiyah tidak hanya fokus pada pelayanan sosial dan pendidikan, tetapi juga secara aktif mendorong partisipasi politik perempuan di akar rumput. Melalui pendidikan kewargaan, pelatihan kepemimpinan, serta keterlibatan dalam forum kebijakan lokal, ‘Aisyiyah berhasil menciptakan ruang aman dan produktif bagi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan politik, meski bukan dalam konteks partai politik formal (Azizah, 2022).

Peran ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa politik tidak selalu harus dipahami dalam pengertian elektoral semata. Partisipasi politik dapat pula diwujudkan dalam bentuk keterlibatan aktif dalam perumusan kebijakan publik, advokasi isu-isu sosial, serta

pengawasan terhadap implementasi program pemerintah. Dalam konteks ini, ‘Aisyiyah telah membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi aktor perubahan sosial dan politik melalui jalur-jalur nonkonvensional, yang justru lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari (Pram, 2024).

Bentuk Keterlibatan Politik ‘Aisyiyah

Keterlibatan politik ‘Aisyiyah dalam advokasi sosial menunjukkan transformasi peran organisasi perempuan dari ruang domestik menuju partisipasi aktif dalam ruang publik. Meski tidak berafiliasi secara langsung dengan partai politik, ‘Aisyiyah memainkan peran politik substantif melalui advokasi isu perempuan dan anak, keterlibatan dalam Musrenbang, serta inisiatif pendidikan politik perempuan. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo, Aisyiyah ikut serta dalam perumusan kebijakan daerah terkait perlindungan perempuan, kesehatan reproduksi, serta pengentasan stunting (Mahardhani, dkk 2020).

Meski tidak berafiliasi secara langsung dengan partai politik, ‘Aisyiyah menjalankan peran politik substantif melalui berbagai aktivitas advokatif. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi ruang partisipatif strategis bagi masyarakat dalam menyusun kebijakan publik. Melalui forum ini, ‘Aisyiyah menyuarakan isu-isu perempuan seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (Sulton, 2023).

Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo, ‘Aisyiyah memiliki kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan daerah. Isu-isu penting yang diangkat antara lain berkaitan dengan perlindungan perempuan dari kekerasan, kesehatan reproduksi, serta upaya pengentasan stunting. Peran ini menunjukkan bahwa organisasi perempuan dapat menjadi penggerak dalam pembangunan lokal yang berkeadilan dan responsif gender (Mahardhani, dkk., 2020).

Selain melalui jalur formal kebijakan, bentuk advokasi sosial ‘Aisyiyah juga diwujudkan lewat pendirian sejumlah layanan langsung kepada masyarakat. Di antaranya adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Aisyiyah yang memberikan pendampingan hukum, pusat layanan psikososial untuk korban kekerasan, serta program pendampingan bagi perempuan penyintas kekerasan seksual. Kegiatan-kegiatan ini menegaskan peran ‘Aisyiyah dalam melindungi dan memberdayakan kelompok rentan (Datin, 2022).

Dengan demikian, ‘Aisyiyah tidak hanya berperan sebagai organisasi sosial-keagamaan, tetapi juga telah berkembang menjadi aktor politik non-partisan yang memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Melalui pendekatan advokasi yang inklusif dan berbasis nilai, ‘Aisyiyah mampu menavigasi ruang politik secara konstruktif tanpa kehilangan identitas keagamaannya.

Dampak terhadap Kebijakan Sosial

Keterlibatan aktif 'Aisyiyah dalam ranah advokasi sosial telah menghasilkan dampak yang signifikan terhadap arah dan substansi kebijakan sosial di berbagai level pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Posisi Aisyiyah sebagai organisasi perempuan berbasis Islam yang memiliki legitimasi sosial dan struktur kelembagaan yang kuat menjadikannya mitra strategis dalam formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan (Kusuma & Kurniawati, 2023).

Salah satu contoh konkret dapat ditemukan di Kabupaten Ponorogo, di mana Aisyiyah berperan aktif sebagai bagian dari jaringan civil society yang terlibat dalam pengesahan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan Perda Perlindungan Anak. Dalam proses tersebut, Aisyiyah tidak hanya memberikan masukan substansi kebijakan, tetapi juga menyuarakan hasil kajian dan aspirasi masyarakat bawah melalui forum-forum partisipatif seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan audiensi dengan DPRD (Sulton, 2023).

Dalam konteks isu kekerasan berbasis gender dan seksual, Aisyiyah juga memainkan peran strategis yang lebih luas. Di samping menyediakan layanan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), organisasi ini aktif mendampingi korban kekerasan seksual serta melakukan kampanye kesadaran publik terkait hak-hak perempuan. Lebih jauh, Aisyiyah ikut mendorong pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk respon sistemik terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Advokasi ini dilakukan baik melalui jalur institusional, seperti dialog dengan pemangku kebijakan, maupun melalui penggalangan dukungan masyarakat sipil dan media (Sukmana, 2018).

Selain aspek legal formal, dampak kultural dari keterlibatan Aisyiyah juga patut dicatat. Melalui pendidikan politik berbasis komunitas, penguatan kapasitas kader perempuan, serta penyebaran narasi "Perempuan Islam Berkemajuan", Aisyiyah telah membantu membentuk kesadaran publik yang lebih progresif terhadap pentingnya representasi perempuan dalam kebijakan sosial. Perubahan wacana ini menjadi modal sosial yang krusial untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik formal dan struktur pengambilan keputusan lainnya (Lelly Qodariah, 2016).

Lebih jauh, kontribusi Aisyiyah terhadap kebijakan sosial juga tampak dalam bentuk pelayanan berbasis masyarakat yang secara langsung melengkapi atau bahkan menggantikan fungsi negara. Melalui amal usaha di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah inklusif, klinik ibu-anak, dan layanan psikososial untuk penyintas kekerasan, Aisyiyah telah

menciptakan ruang aman dan pemberdayaan yang berdampak jangka panjang pada kualitas hidup masyarakat akar rumput (Rahmi, 2021).

Di tingkat nasional, pendekatan Aisyiyah yang bersifat kolaboratif, transformatif, dan non-konfrontatif memungkinkan organisasi ini menjalin hubungan baik dengan berbagai pemangku kebijakan. Hal ini berdampak pada terbukanya akses jaringan kebijakan yang bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan isu-isu strategis seperti pencegahan pernikahan anak, penanggulangan stunting, serta perlindungan perempuan pekerja migran (Aisyatul Munawaroh, 2024).

Selain mendorong terbentuknya regulasi, pengaruh Aisyiyah terhadap implementasi kebijakan sosial juga sangat nyata. Di berbagai daerah, kader Aisyiyah dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi program pemerintah, misalnya dalam program keluarga harapan (PKH), layanan puskesmas ramah perempuan, dan pemantauan pelaksanaan perda perlindungan anak. Kegiatan ini mencerminkan posisi Aisyiyah bukan hanya sebagai advokat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor pelaksana dan pengawas sosial yang berperan dalam mengawal keadilan distribusi layanan publik (Crisna Dewi, Y.B. Jurahman, 2020).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan politik Aisyiyah telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan struktur kebijakan sosial yang lebih responsif gender dan berpihak pada kelompok rentan. Peran ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas advokasi, konsolidasi jaringan gerakan perempuan, serta pembentukan sistem monitoring evaluasi kebijakan berbasis komunitas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang cukup kompleks. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan telah diterapkan, implementasi di lapangan belum berjalan optimal. Budaya patriarki yang masih kuat serta minimnya dukungan dari partai politik terhadap kader perempuan menjadi penghalang utama. Selain itu, kurangnya pendidikan politik dan akses informasi juga turut melemahkan posisi perempuan dalam dunia politik formal.

Dalam konteks ini, organisasi perempuan berbasis Islam seperti 'Aisyiyah memainkan peran strategis sebagai aktor non-partisan yang mendorong representasi politik substantif perempuan melalui jalur advokasi sosial. 'Aisyiyah tidak hanya aktif dalam kegiatan pelayanan sosial dan keagamaan, tetapi juga secara konsisten memperjuangkan isu-isu publik seperti perlindungan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, dan pengentasan stunting.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa perempuan dapat memainkan peran politik yang signifikan melalui pendekatan non-konvensional yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Bentuk keterlibatan politik Aisyiyah terlihat dalam partisipasi aktifnya di forum-forum kebijakan seperti Musrenbang, serta pendirian layanan advokasi seperti LKBH dan pusat layanan bagi korban kekerasan. Selain itu, Aisyiyah juga menjalankan strategi berjenjang melalui kerja basis, garis depan, dan unit pendukung untuk membangun kekuatan advokatif yang berkelanjutan dan berbasis bukti. Pendekatan ini memperkuat posisi Aisyiyah sebagai organisasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam berkemajuan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Faktor pendukung keberhasilan Aisyiyah mencakup legitimasi sosial dan religius yang dimiliki, struktur kelembagaan yang kuat hingga tingkat akar rumput, serta kaderisasi internal yang sistematis. Namun, tantangan tetap muncul dalam bentuk resistensi budaya patriarki, stigma terhadap isu kekerasan seksual, dan keterbatasan sumber daya. Ketimpangan relasi kuasa antara organisasi masyarakat sipil dan elite politik lokal juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong kebijakan yang responsif gender.

Keterlibatan aktif Aisyiyah dalam advokasi sosial terbukti memberikan dampak nyata terhadap kebijakan publik, baik secara formal dalam bentuk regulasi maupun secara kultural dalam membentuk kesadaran masyarakat. Kontribusi Aisyiyah dalam isu-isu strategis seperti perlindungan anak, pengesahan UU TPKS, dan pencegahan pernikahan anak menjadi bukti bahwa organisasi perempuan berbasis agama memiliki kapasitas dan legitimasi untuk mengintervensi kebijakan sosial. Oleh karena itu, model advokasi Aisyiyah perlu terus didukung dan dikembangkan sebagai bagian dari gerakan perempuan yang berorientasi pada keadilan dan demokrasi lokal.

SARAN

Pertama, penting bagi Aisyiyah untuk terus memperkuat kapasitas advokasinya melalui peningkatan pelatihan hukum, pendidikan politik, serta penguatan basis data dan riset sosial. Langkah ini akan memperkuat posisi organisasi sebagai aktor kebijakan yang tidak hanya moral, tetapi juga berbasis bukti dan profesional dalam menyuarakan kepentingan publik, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan difabel.

Kedua, perlu dilakukan sinergi yang lebih luas antara Aisyiyah dengan jaringan organisasi masyarakat sipil lainnya, lembaga pemerintah, dan media massa. Kolaborasi ini dapat memperluas dampak advokasi serta membuka ruang dialog yang lebih luas dan efektif

dengan pemangku kebijakan, terutama dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dan hak asasi manusia.

Ketiga, pemerintah dan lembaga legislatif perlu memberikan ruang yang lebih terbuka bagi partisipasi organisasi perempuan dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan. Selain itu, dukungan berupa pendanaan, akses informasi, dan regulasi yang menjamin partisipasi publik perlu diperkuat agar advokasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Aisyiyah tidak hanya menjadi gerakan moral, tetapi juga memiliki daya tekan politik yang nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyatul Munawaroh, Septiani, N. M., & Asriadi, A. (2024). Peran Organisasi Aisyiyah Dalam Meningkatkan Pengamalan Pendidikan Islam Indonesia. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(2), 78–88. <https://doi.org/10.62083/ck2ak663>
- Azizah, N., ZA, I., & Maksum, A. (2022). Strategi Aisyiyah Untuk Meningkatkan Kehadiran Perempuan dalam Politik. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat, March 2022*. <https://doi.org/10.18196/ppm.41.796>
- Crisna Dewi, Y.B. Jurahman, S. (2020). *PERJUANGAN AISYIYAH DALAM BIDANG SOSIAL DAN PENDIDIKAN DI YOGYAKARTA TAHUN 1917 - 1945*. 1(2), 34–45.
- Datin, R. (2022). Advokasi Organisasi Aisyiyah Jawa Timur Terhadap Kasus Kekerasan Seksual. *Al Maqashidi*, 5(1), 1–18.
- Dony Irawan, A., Mutiara Sanni, D., Ambarwati, D. F., Vevi, A., & Hermawan, A. P. (2024). *Prosiding Seminar Hukum Aktual Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender*. <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>.
- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). The TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>
- Harun, N. I. (2019). New Paradigm For Strengthening Women's Political Capacity in the Process of Public Policy Processing. *Journal of Governance*, 4(2), 171–186. <https://doi.org/10.31506/jog.v4i2.6526>
- Kusuma, N. I., & Kurniawati, T. (2023). Skrining Kesehatan Lansia dan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Lanjut pada Kelompok Ibu Aisyiyah. *Ahmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 86–90. <https://doi.org/10.53770/amjpm.v2i2.163>
- Lelly Qodariah, L. (2016). Aisyiyah Organization and Social Change for Women. *Journal of Education and Practice*, 7(24), 1–5.
- Mahardhani, Ardhana Januar, Sulton, dan S. (2020). PERAN CIVIL SOCIETY

- ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO). *Journal of Public Sector Innovations*, 4(2), 59–62.
- Nadliroh, U., Tinggi, S., Islam, A., & Tengah, J. (2024). *Model Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan Muslim untuk Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu 2024 : Studi pada LKP2A Pati Jawa Tengah*.
- Ningsih, F., Melayu, H. A., & Eriyanti, N. (2025). Kesetaraan Gender dan Representasi Politik: Perjuangan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(2), 168–182. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10602>
- Nurjanah, A., Mutiarin, D., Supangkat, G., & Iqbal, M. (2022). Aisyiyah Organizational Communication in Realizing the True Islamic Society. *Jurnal ASPIKOM*, 7(1), 142. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v7i1.895>
- Pram, A. (2024). *Pandangan 'Aisyiyah Tentang Perempuan dan Politik*.
- Prihatin, N., Sulton, S., & Asmaroini, A. P. (2021). Politik Representasi Aisyiyah dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ponorogo Tahun 2020. *Jurnal Civic Education ...*, 1–11.
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan bagi Pengurus 'Aisyiyah di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2), 246–256. <https://doi.org/10.53695/jas.v2i2.427>
- Sukmana, O. (2018). The Islamic Women Movement For Social Welfare In Indonesia: A Study on Women's Organization "Aisyiyah" in Malang Regency, East Java-Indonesia. *Asian Journal for Poverty Studies*, 4(1), 16–19.
- Sulton, S., Mahardhani, A. J., & ... (2023). Muhammadiyah And Aisyiyah Involvement In Public Policy Making In Ponorogo District. *Jhss (Journal of ...)*, 07(02), 391–394.
- Umagapi, J. L. (2020). *TANTANGAN DAN PELUANG WOMEN ' S REPRESENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION : dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif di raih Indonesia terkait representasi perempuan di politik , meskipun kenaikannya tidak signifikan hanyalah masalah gender d.* 19–34.